

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Democratic People's Republic of Korea atau lebih sering dikenal dengan Korea Utara adalah sebuah negara yang terletak di Kawasan Asia Timur. Negara ini merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih menganut ideology komunis secara murni, karena masih menerapkannya baik di sistem politik, pemerintahan, dan ekonomi. Negara ini juga masih menerapkan peraturan yang ketat, baik bagi warga negaranya sendiri maupun warga asing yang berkunjung kesana. Sehingga negara ini masih misterius bagi masyarakat internasional.

Korea Utara berbatasan langsung dengan negara *People's Republic of China* atau lebih dikenal dengan China di sebelah utara dan *Republic of Korea* atau lebih dikenal dengan Korea Selatan di sebelah selatan. Sebelumnya sejak tahun 1990, wilayah Semenanjung Korea dijajah oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, negara Korea Utara dan negara Korea Selatan awalnya merupakan satu kesatuan yang bernama Korea, namun ketika Jepang kalah pada Perang Dunia II Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai pihak yang memenangkan Perang Dunia II menduduki dan mengontrol wilayah ini.

Pada tahun Agustus 1945, Uni Soviet dan Amerika Serikat sepakat untuk membagi wilayah Semenanjung Korea menjadi dua bagian tepat garis lintang 38° Lintang Utara. Namun, dibalik pembagian tersebut tersimpan rencana masing-masing dari dua negara adidaya pemenang Perang Dunia II tersebut. Ketika membagi wilayah Semenanjung Korea menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, dengan dua ideologi yang berbeda pula. Korea Utara dipengaruhi Uni Soviet dengan ideologi sosialis komunis, sementara Korea

Selatan dipengaruhi Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalis (Putra, 2016, hal. 1).

Gambar 1.1 Peta Pembagian Semenanjung Korea



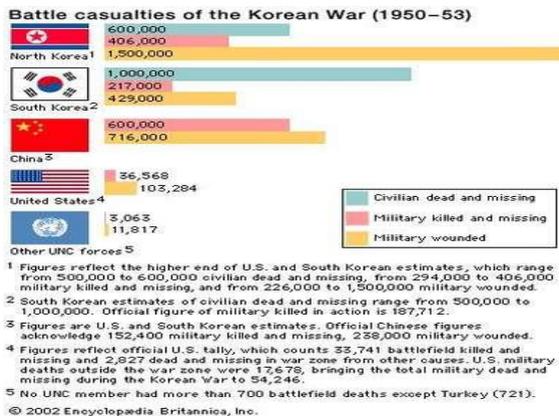
Sumber : *Map of World*
(<https://www.mapsofworld.com/asia/south-korea-north-korea-map.html>)

Pasca berakhirnya Perang Dunia II dan terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua, keamanan dan kedamaian belum terwujud di wilayah tersebut. Pasalnya Uni Soviet dan Amerika Serikat memiliki kepentingan tersendiri di wilayah tersebut, tujuannya yaitu memenangkan perebutan pengaruh secara keseluruhan di Semenanjung Korea. Uni Soviet menyiapkan Kim Il Sung sebagai calon pemimpin Komunis di Semanjung Korea, Kim Il Sung telah melewati berbagai macam pelatihan baik pelatihan politik maupun militer di Uni Soviet. Sementara itu, Amerika Serikat menyiapkan Syngman Rhee sebagai calon pemimpin Korea yang telah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat selama puluhan tahun.

Korea Utara dan Korea Selatan resmi menjadi negara merdeka pada tahun 1948 atas prakarsa dua

negara adikuasa pendukung masing-masing pihak. Kemerdekaan kedua negara tersebut malah semakin memanas situasi di Semenanjung Korea, karena kedua negara bertekad menyatukan Semenanjung Korea dibawah satu bendera. Situasi yang semakin memanas berujung pada perang terbuka atau yang sering disebut sebagai Perang Korea (1950-1953). Perang yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tersebut menjadi semacam *proxy war* antara komunis melawan liberal. Perang tersebut juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 2.5 juta jiwa di kedua belah pihak, baik dari militer maupun masyarakat sipil.

Tabel 1.1 Total Jumlah Korban Perang Korea



Sumber : Encyclopædia Britannica, Inc
 (<https://www.britannica.com/event/Korean-War/Introduction>)

Perang Korea setelah memakan lebih dari dua juta korban jiwa dan telah membuat menderita di kedua belah pihak, akhirnya pertempuran diakhiri pada Juli 1953 dengan Korea masih terbagi menjadi dua negara yang bermusuhan. Negosiasi yang dilakukan pada tahun 1954 tidak menghasilkan kesepakatan lebih lanjut dan garis

depan telah diterima sejak batas *de facto* antara Korea Utara dan Korea Selatan disepakati kedua belah pihak. Sehingga status dari Perang Korea hanya sebatas gencatan senjata tanpa adanya perjanjian damai dari kedua negara (Millett, 2015).

Setelah berakhirnya Perang Korea, dunia kemudian terpolarisasi menjadi dua blok (blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat) yang menyebabkan terjadinya Perang Dingin (*Cold War*). Selama Perang Dingin, Amerika Serikat mengerahkan senjata nuklir ke Korea Selatan yang tujuannya untuk mencegah agresi dari Korea Utara (yang belum memiliki senjata nuklir) dan sampai batas tertentu juga dari Uni Soviet dan China. Sejak Januari 1958, Amerika Serikat mulai mengirimkan senjata nuklirnya ke Korea Selatan dan hingga akhir 1960-an, sebanyak delapan jenis yang berbeda dikerahkan dan memuncak pada ketinggian sepanjang masa sekitar 950 hulu ledak nuklir pada tahun 1967 (Kristensen & Norris, 2017).

Korea Utara merasa terancam dengan langkah Amerika Serikat tersebut, sehingga pada tahun 1959 Korea Utara dan Uni Soviet menandatangani kesepakatan tentang penggunaan energi nuklir dan Uni Soviet juga membantu mendirikan sebuah kompleks penelitian nuklir di Yongbyon, Provinsi Pyongan Utara. Pada awal 1960-an, Uni Soviet memberikan bantuan *technical assistance* kepada Korea Utara dalam membangun Pusat Penelitian Nuklir Yongbyon, serta instalasi reaktor Soviet IRT-2000 *nuclear research* dan fasilitas terkait (Bermudez, 1991).

Senjata nuklir merupakan senjata paling menakutkan di dunia, sebab senjata nuklir bersifat *mass destruction* yang ledakannya mampu mempengaruhi stabilitas keamanan global. Jika Korea utara berhasil mengirimkan senjata nuklirnya hal tersebut akan memicu terjadinya perang nuklir sehingga yang merasakan akibatnya adalah seluruh negara yang ada di dunia. Oleh

karena itu kepemilikan Senjata nuklir oleh Korea utara akan menaikkan *bergainin positon* Korea utara dalam balance of terror.

Pada tahun 1991, Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk menarik semua senjata nuklir Amerika Serikat yang berada di Korea Selatan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Namun Kim Il Sung tetap melanjutkan program nuklir Korea Utara meskipun sudah tidak mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Ketika Kim Il Sung wafat pada 8 Juli 1994, Pemimpin Korea Utara yang kedua Kim Jong Il yang juga merupakan putra dari Kim Il Sung tetap melanjutkan program nuklir yang telah dimulai oleh ayahnya tersebut.

Pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong Un yang juga merupakan putra dari Kim Jong Il yang mulai menjabat sebagai kepala negara Korea Utara sejak 29 Desember 2011 menggantikan ayahnya. Awalnya banyak yang mengira bahwa Kim Jong Un tidak akan seperti pendahulu-pendahulunya dan dapat dijadikan mitra dialog yang baik untuk segera tercapainya kesepakatan damai yang abadi di kawasan Semenanjung Korea. Namun ternyata anggapan tersebut salah, bahkan Kim Jong Un lebih agresif daripada para pendahulunya.

Kim Jong Un kemudian dikarakteristikan sebagai kepala negara yang sangat antagonis dan penyebar ancaman terhadap perdamaian dunia, hal tersebut karena posisi Korea Utara yang selalu bertentangan dalam berbagai isu keamanan dengan dunia internasional. Pertentangan tersebut berasal dari semakin giatnya Korea Utara dalam mengembangkan senjata peluru kendali (rudal) yang dapat diisi hulu ledak nuklir. Bahkan, Kim Jong Un pada masa jabatannya sejak 2011 telah melakukan uji coba nuklir sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 2013, September 2016 dan September 2017 (BBC, 2016).

Pada masa Kim Jong Un, Korea Utara telah mendapatkan beberapa kali sanksi dari PBB yang diakibatkan oleh uji coba rudal yang membahayakan negara-negara kawasannya. Sanksi-sanksi tersebut diberikan pada 23 Januari 2013 (Resolusi 2087), 7 Maret 2013 (Resolusi 2094), 2 Maret 2016 (Resolusi 2270), 30 November 2016 (Resolusi 2320) (Tempo.co, 2017). Sanksi-sanksi yang diberikan oleh PBB tersebut menyebabkan ekonomi di Korea Utara semakin sulit, bahkan sampai terjadi bencana kelaparan di negara tersebut. Namun hal tersebut tetap saja tidak dapat menghentikan ambisi dari Kim Jong Un.

Pada 4 Juli dan 28 Juli 2017, Korea Utara kembali menggelar uji coba peluncuran rudal balistik antar benua yang dapat diisi hulu ledak nuklir dan dinilai dapat mengancam negara-negara yang berada di dekatnya. Bahkan rudal uji coba tersebut oleh para ahli diklaim mampu menyerang daratan Amerika Serikat. Rudal antar benua yang berpotensi mampu membawa hulu ledak nuklir yang diluncurkan oleh Korea Utara tersebut mampu terbang selama 53 menit dan menembus wilayah-wilayah teritorial negara tetangganya sebelum jatuh di laut Jepang yang merupakan wilayah kedaulatan Jepang (O'Connor, 2017).

Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera mengatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara telah berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Onodera menilai ancaman program senjata nuklir dan konvensional Korea Utara tersebut telah mencapai tingkat sangat kritis. Profesor Daniel Pinkston dari Universitas Troy di Seoul berpendapat bahwa uji coba ini bukanlah sesuatu yang dapat dinegosiasikan karena ini adalah bagian dari identitas Korea Utara yang sulit diatur dan ini merupakan bagian dari kebijakan keamanan nasionalnya. Korea Utara menilai semua resolusi DK PBB tidak sah dan mereka akan terus menantang semua resolusi DK PBB

serta menantang komunitas internasional (Schearf, 2017). Banyak negara mengemukakan kebijakan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut, terutama negara-negara yang bertetangga dengan Korea Utara. Bahkan negara sekutu Korea Utara seperti Rusia dan China pun juga menentang kebijakan tersebut.

Setelah melakukan uji coba nuklir tersebut, pada Agustus 2017, Korea Utara mendapatkan sanksi berat yang merupakan Resolusi 2371 dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB). Hal tersebut dilakukan agar Kim Jong Un selaku Pemimpin negara Korea Utara mengurungkan niatnya atau bahkan menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Sanksi tersebut yaitu berupa sanksi ekonomi dan perdagangan dengan cara melarang penjualan bahan bakar pesawat terbang dan teknologi roket ke negara tersebut, serta membatasi ekspor batu bara, biji besi atau mineral lainnya dari Korea Utara yang merupakan produk ekspor terbesarnya. PBB juga membatasi transaksi keuangan oleh bank-bank Korea Utara dan melarang semua penerbangan yang diindikasikan membawa barang-barang selundupan ke Korea Utara.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa ini adalah sanksi paling keras terhadap suatu negara dalam satu generasi. Namun, bukannya menghentikan program nuklirnya, malahan setelah di jatuhkannya sanksi oleh PBB Kim Jong Un memberikan respon terhadap sanksi tersebut dengan menembakkan enam peluru rudal balistik ke arah semenanjung Korea.

Korean Central News Agency (KCNA) memberikan statemen bahwa sanksi-sanksi yang di berikan oleh PBB terhadap negaranya merupakan sebuah pelanggaran keras terhadap negara yang berdaulat. KCNA mengatakan tak akan membawa senjata nuklir pertahanan diri mereka ke meja perundingan selagi menghadapi ancaman-ancaman

dari Washington dan tak akan pernah mengambil satu pun langkah mundur dari peningkatan kekuatan nuklir mereka (Christiastuti, 2017).

Sebagai Pemimpin negara yang berdaulat, tentu saja Kim Jong Un memiliki alasan dan pertimbangan yang matang demi mempertahankan negaranya dari segala bentuk hegemoni dan serangan dari luar negaranya. Oleh karena itu, Kim Jong Un tetap tegas mengatakan bahwa Korea Utara akan terus mengembangkan alat pertahanan negara untuk mempertahankan negaranya walaupun telah mendapatkan banyak kecaman bahkan sanksi internasional. Tentunya ada alasan dan tujuan dari kebijakan Kim Jong Un tetap melakukan hal tersebut. Sehingga fenomena ini menarik perhatian dari penulis untuk mengkaji hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : **“Mengapa Kim Jong Un tetap melakukan uji coba peluru kendali meski telah dijatuhi sanksi oleh PBB?”**

C. Kerangka Teori

1. Konsep *Balance of Terror*

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan kemudian menjawab permasalahan maka dalam kerangka teori ini penulis menggunakan konsep *balance of terror*. Konsep ini menurut para ahli dianggap sebagai kelanjutan dari *balance of power*, konsep ini muncul ketika *cold war* akan berakhir dengan bubarnya Uni Soviet dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara *Super Power*. Konsep ini dikemukakan oleh J.A.C. Edward ketika melihat mulai banyaknya negara-negara yang mengembangkan senjata pemusnah massal (nuklir).

Fenomena perlombaan terhadap pengembangan dan memproduksi senjata massal (nuklir) ini sangat menarik perhatian bagi pengamat Hubungan Internasional.

“The first and fundamental requirement for preverving peace through a balance of terror is that each side must possess, and be seen to possess, a capacity to inflict horrendous demage on the other - demage on a scale which the other would find quite unacceptable. in addition, each side must remain, capable of inflicting such damage on the other even if the other has struck him first” (Edward, 1986, hal. 4).

Menurut Edward, negara-negara yang memproduksi nuklir ini menganggap bahwa hal tersebut merupakan persyaratan mendasar untuk menciptakan perdamaian yang menenteramkan bagi negara mereka melalui keseimbangan teror. Konsep ini menilai bahwa masing-masing pihak harus memiliki dan terlihat memiliki suatu kapasitas untuk menimbulkan ancaman kehancuran (senjata nuklir) yang menghebohkan bagi pihak lain (lawan). Ancaman kerusakan pada skala yang besar yang akan sangat tidak dapat diterima oleh pihak lain, sehingga setiap pihak harus tetap mempertahankan ancaman yang ada agar mampu menimbulkan ancaman kerusakan seperti yang dilakukan dipihak lain bahkan jika pihak lain tersebut telah menyerangnya terlebih dulu.

Fenomena *balance of terror* ini biasanya terjadi pada negara yang sedang mengalami ketegangan, sehingga negara tersebut akan merasa aman dan damai ketika dapat memberikan ancaman yang sama seperti yang dilakukan oleh lawannya. Contohnya yaitu India dan Pakistan, Israel dan negara-negara Arab, Iran dan Amerika Serikat (ditambah negara-negara Arab), serta Korea Utara dan Korea Selatan (ditambah Amerika Serikat). Contoh yang terakhir masih mengalami *balance of terror* hingga saat ini.

Korea Utara merasa tidak nyaman dengan kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, di mana Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di Jepang dan Korea Selatan. Kemudian kerapnya Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan menyebabkan Korea Utara merasa tidak aman. Dipihak lain, Korea Selatan juga merasa tidak aman dan merasa terancam dengan pengembangan senjata nuklir Korea Utara ditambah lagi dengan seringnya percobaan peluncuran rudal oleh Korea Utara di era Kim Jong Un menyebabkan Korea Selatan merasa sangat terancam.

D. Hipotesa

Kim Jong Un tetap melakukan uji coba peluru kendali meski telah dijatuhi sanksi oleh PBB karena :Nuklir sebagai satu-satunya alat yang dapat memberikan ancaman balik bagi Amerika Serikat.

1. Nuklir sebagai pertahanan terakhir untuk mengantisipasi invasi atau serangan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap Korea Utara.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tujuan dari Kim Jong Un dibalik pengembangan senjata nuklir dan peluncuran uji coba peluru kendali yang berpotensi mampu membawa hulu ledak nuklir.
2. Untuk mengetahui alasan Kim Jong Un tetap melanjutkan peluncuran uji coba peluru kendali meskipun telah mendapatkan sanksi dari PBB.

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya (Arikunto, 2006, p. 12).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder atau menggunakan study pustaka (*Library Research*) dengan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu digambarkan secara sistematis. Penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang telah tersedia, dengan melakukan telaah pustaka pada sejumlah literatur, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yaitu antara lain:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal dan dokumen
- c. Majalah dan surat kabar
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*web site*)

3. Tingkat Analisa

Tingkat analisa adalah *Nation-state* yang membahas kebijakan Kim Jong Un yang tetap melanjutkan program nuklir meskipun telah diberikan sanksi oleh PBB.

4. Metode Analisa

Metode analisa dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang bersifat penjelasan secara nyata tentang alasan Kim Jong Un tetap melanjutkan

program senjata nuklirnya meskipun telah mendapatkan sanksi PBB tahun 2012-2017 (Symon & Gillian, 1994, pp. 3-4).

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Penelitian ini dimulai dari tahun 2012 ketika Kim Jong Un dilantik sebagai Pemimpin tertinggi Korea Utara, hingga uji coba rudal balistik antarbenua terakhir Korea Utara diakhir tahun 2017. Cakupan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni tahun 2012-2017.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika karya ilmiah ini penulis susun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas tentang sejarah perkembangan senjata nuklir Korea Utara sejak era kepemimpinan Kim Il Sung hingga era kepemimpinan Kim Jong Un.

BAB III akan membahas tentang respon dan tekanan dari negara-negara dikawasan serta dunia internasional terhadap Korea Utara atas uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara.

BAB IV akan membahas alasan Kim Jong Un untuk tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklir Korea Utara meskipun telah dijatuhkan sanksi oleh PBB.

BAB V Penutup akan berisi bagian akhir dari karya tulis ini yang akan menjadi rangkuman dari bab-bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.